



Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur

The Impact of Regional Expansion on Community Welfare in Loea District, East Kolaka Regency

Harianti*; Arafat; Taslim Fait

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
Arafat12@gmail.com

Kata Kunci:

masyarakat;
pemekaran wilayah;

Keywords:

public;
area expansion;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan interactive model yang terdiri dari reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah berdampak positif terhadap tingkat pendidikan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana.

This study aims to determine the impact of the expansion of the Loea District, East Kolaka Regency on the welfare of the community. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data obtained from observations, interviews, and secondary data related to the research theme. The data were then analyzed using an interactive model consisting of data reduction in data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that regional expansion has a positive impact on the level of public education, increasing job opportunities, improving the community's economy, and developing facilities and infrastructure.



PENDAHULUAN

Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai bidang dan sektor kegiatan (Wenda & Akib, 2015). Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik (Purwadi, 2013). Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan (Setiaji & Adi, 2007). Kebijakan Otonomi Daerah Memberi kebebasan pada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik (Henny Mayrowani, 2012). Pembangunan di era otonomi daerah bukan hanya bertumpu pada sektor ekonomi semata, (Basuki et al., 2009). Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Nadir, 2013). Pembangunan tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai, namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang lebih luas, (Widianingsih & Pancasilawan, 2018). Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan juga mempertimbangkan faktor lain yang dapat merubah kehidupan sosial masyarakat kearah yang lebih baik (Rosana, 2018).

Mewujudkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, bertujuan untuk mengurangi berbagai ketimpangan (Disparitas) antar wilayah/daerah, antar sektor dan antar kelompok ekonomi. Untuk itu selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai (Ristanti et al., 2017), juga ada tiga kriteria sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan yaitu kemiskinan, pengangguran dan distribusi/pembangian pendapatan nasional, (Widayanti et al., 2017).

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Choiriyah, 2018). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.

Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi (Prawoto, 2009). Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dilandasi oleh asas pemerataan (keadilan), maka kebijakan pembangunan harus dapat menjamin pembangian pendapatan yang lebih merata antara wilayah, mencegah melebarnya jurang pemisah antara kelompok, golongan ekonomi kuat dan ekonomi lemah, serta menghilangkan kesenjangan pendapatan antara wilayah, (Harmantyo, 2010). Salah satu kesulitan yang didapat dalam pembangunan khususnya dipedesaan adalah kesempatan untuk peningkatan struktur sosial ekonomi tidak ditunjang oleh penyediaan fasilitas sosial ekonomi, kelembagaan regulasi.

Memperhatikan keadaan geografis dan topografis Kabupaten Kolaka Timur yang berbukit, bergunung dan sebagian daratan menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan serius untuk mendapatkan penanganan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi wilayah yang ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan dan perkebunan menjadikan Kabupaten Kolaka mestinya mampu



mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini memungkinkan pemerintah untuk menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara substansial mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Arah program pembangunan Kabupaten Kolaka Timur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Kabupaten Kolaka Timur yang kaya akan hasil bumi dan tambang secara tidak langsung memberikan dampak psikologis yang kurang dapat menguntungkan masyarakat setempat, khususnya dalam usaha untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur. Untuk itu perlu kebijakan pembangunan yang fundamental guna mempercepat laju pembangunan dikawasan Kolaka Timur agar tercipta keseimbangan pembangunan antara kawasan.

Salah satu strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang saat ini tengah dikembangkan adalah pemekaran dan pendefinitifan beberapa kecamatan yang baru berkembang untuk menjadi kecamatan baru di Kabupaten Kolaka Timur. Beberapa kecamatan baru yang berada kawasan Kabupaten Kolaka Timur yang diantaranya adalah Kecamatan Tinondo, Aere, Lalolae dan Kecamatan Loea. Melalui kebijakan pembentukan kecamatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap masyarakat khususnya dalam pelayanan pemerintah, pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan atau pemerataan fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi suatu pemicu dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan wilayah antar kawasan dan meningkatkan selerasi pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

Sejalan dengan peningkatan status beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, maka hal utama yang perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah bagaimana proses penguatan wilayah dan penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi masyarakat, potensi wilayah dan dukungan kebijakan pemerintah setempat dapat menciptakan sinergi antar wilayah yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan masyarakat yang kesemuanya bermuara pada usaha untuk perbaikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut harus menjadi prioritas utama dengan mempercepat proses perubahan menuju keseimbangan pembangunan antar wilayah yang disikapi oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan pembentukan kecamatan baru yang salah satunya adalah Kecamatan Loea yang merupakan bagian dari Kecamatan Tirawuta yang berhasil dimekarkan pada tahun 2010. Dengan pembentukan kecamatan baru diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Loea

Melihat potensi Kecamatan Loea yang berada di jalan poros Ladongi perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk dapat mendorong pertumbuhan wilayah Kecamatan Loea, bukan hanya pada saat pembentukan tetapi bagaimana aplikasi pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tersebut, setelah terbentuk kecamatan baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Magdalena Silawati Samosir, 2020). Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari 5 informan diantaranya : 1) Camat, 2) Sekretaris Camat, 3) Perwakilan Pegawai Kecamatan, 4) Perwakilan Kepala Desa dan 5) Masyarakat. Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang disebut interactive model, dimana terdiri atas reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan, penarikan/verifikasi (conclusion, drawing/verification) (Daswati et al., 2020).



HASIL DAN DISKUSI

Peningkatan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan suatu kondisi dimana pembangunan pendidikan di kecamatan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, dan diharapkan agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan seluas-luasnya.

Dari hasil penelitian diketahui, sebelum terjadinya pemekaran di Kecamatan Loea pembangunan pendidikan masih sangat terbatas. Jumlah taman kanak-kanak hanya 1 dengan jumlah 1 orang, dan berstatus swasta. Sekolah Dasar Negeri berjumlah 3 unit, dengan jumlah guru 16 orang dan jumlah murid 573. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri jumlahnya 114 orang. Setelah terjadinya pemekaran pada tahun 2010, jumlah Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 12 unit. Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 3 unit. Sedangkan jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat sudah tersedia sebanyak 1 unit yakni SMK, sehingga apabila masyarakat melanjutkan ke jenjang SLTP adan SLTA masyarakat tidak harus menempuh keluar wilayah lagi.

Pembangunan pendidikan di Kecamatan Loea dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah dilihat dari aspek pendidikan yang mereka miliki, sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Tingkat pendidikan yang cukup memadai dapat menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan masyarakat. Selain itu tingkat pendidikan menggambarkan derajat kemampuan yang dimiliki seseorang, tingkat pendidikan juga menjadi landasan untuk menentukan pilihan masa depan selanjutnya, baik pekerjaan maupun keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu, upaya peningkatan mutu pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berilmu pengetahuan. Sedangkan usaha perluasan wajib belajar dimaksudkan agar pendidikan usia sekolah yang tiap tahun meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Peningkatan Sarana Kesehatan

Peningkatan sarana kesehatan merupakan salah satu pewujudan usaha mencapai keadilan sosial dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warganya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat di laksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesehatan di Kecamatan Loea dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian pula halnya pelaksanaan program Keluarga Berencana diarahkan untuk menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tersebut diatas diarahkan baik dibidang kesehatan maupun dibidang keluarga berencana, pada tahun 2010 di wilayah ini diupayakan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta tenaga untuk pelayanan kesehatan dan keluarga berencana sampai ke pelosok Kecamatan/Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah pemekaran terdapat 13 fasilitas kesehatan terdiri dari puskesmas 1 unit, puskesmas pembantu 2 unit, posyandu 5 unit dan bakesra 4 unit. Sementara tenaga kesehatan (tenaga medis dan para medis) sebagaimana disajikan pada tabel 10 diatas yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 6 perawat, 1 bidan, 2 tenaga kesehatan lainnya dan 6 dukun bagi terlatih.



Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat, artinya disamping jaraknya sudah semakin dekat dengan rumah warga, juga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik karena pelayanannya bukan saja berdasarkan pada hubungan formal tetapi juga hubungan informal, sehingga masyarakat merasa puas dilayani. Sebelum pemekaran dilakukan sarana kesehatan yang ada di kecamatan boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan. Namun dengan pemekaran ini dapat memberikan pelajaran tersendiri untuk masyarakat, tentang kemandirian dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan yang ada dikecamatan dan dengan pemekaran ini, maka Kecamatan Loea sudah dapat melakukan pemeriksaan di sendiri tanpa harus pergi ke kecamatan lain.

Peningkatan Sarana Jalan

Sarana jalan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena selain akses jalan digunakan sebagai transportasi untuk menghubungkan kecamatan satu dan kecamatan lainnya, juga untuk mendukung aktivitas manusia terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu dengan cara membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah antar di wilayah tersebut. Sehingga jalan dapat dikatakan sebagai akses penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, sebab apabila sarana jalan yang tidak memadai menyebabkan kegiatan transportasi masyarakat terhambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan yang dilakukan oleh Kecamatan Loea dapat meningkatkan sarana jalan karena akses perekonomian masyarakat dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya menjadi lancar. Jalan merupakan salah satu sarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya.

Peningkatan Kesempatan Kerja

Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur yang dimekarkan pada tahun 2007 juga mengalami peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Loea mengalami peningkatan setelah adanya pemekaran wilayah kecamatan yang dilihat pada tahun 2007 sampai dengan 2010 berjumlah 6.967 jiwa yang terbagi dari Laki-Laki sebanyak 3.609 Jiwa dan Perempuan sebanyak 3.358 jiwa, untuk dapat mengetahui apakah terjadi lonjakan peningkatan penduduk maka dapat dilihat pada data sensus penduduk pada tahun 2015 yakni berjumlah 7.141 Jiwa yang terbagi dari laki-laki sebanyak 3.695 jiwa sementara perempuan sebanyak 3.446 jiwa. Berdasarkan data tersebut diatas maka pemekaran wilayah kecamatan khususnya Kecamatan Loea mengalami perubahan dalam peningkatan jumlah penduduk.

Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pokok dan sampingan yang digeluti oleh masyarakat sehingga dari pekerjaan tersebut dapat menambah penghasilan dari segi ekonomi masyarakat yang menyebabkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan memanfaatkan melalui penggunaan potensi-potensi yang ada di kecamatan dengan semaksimal karena dari jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian mereka. Sehingga dari hasil tersebut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan terlibat dengan masalah ekonomi. Dapat dan tidaknya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kondisi ekonomi yang ada di dalam keluarganya. Hal ini memberikan bahwa manusia saling berhubungan satu dengan lainnya (mahluk sosial) yang merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai arti serta peranan dalam kehidupan ekonomi.



Berdasarkan hasil penelitian menyatakan tidak ada peningkatan pendapatan sebelum terjadi pemekaran, hal ini disebabkan kurangnya para pelanggan dan bahkan ada sebagian masyarakat yang berencana menutup toko. Ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terjadi peningkatan penghasilan setelah pemekaran, hal ini sesuai dengan cita-cita pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten kolaka yaitu dalam rangka pemekaran kecamatan Loea yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Loea. Dimana hal ini dimaksud, bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Loea mengatakan bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak dalam peningkatan jenis pekerjaan. Karena potensi-potensi yang ada di kecamatan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian telah meyakinkan penulis bahwa pemekaran kecamatan cukup berdampak pada peningkatan jenis pekerjaan, karena setelah pemekaran dilakukan masyarakat Kecamatan Loea telah memanfaatkan segala potensi yang dimiliki meski belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Pendapatan

Meningkatkan pendapatan merupakan cita-cita oleh setiap orang dalam hal ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemekaran diharapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Artinya dengan adanya pemekaran Kecamatan Loea diharapkan pemerintah kecamatan mampu menciptakan lapangan kerja, karena wilayah kerjanya sudah relatif besar sehingga potensi yang tersedia dapat bermanfaat dengan baik, yang pada gilirannya dapat menambah pendapatan masyarakat. Pemekaran Kecamatan Loea sangat menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan Kecamatan.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan di Kecamatan Loea setelah mekar sangat membantu menambah pendapatan masyarakat dalam halnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan karena pemerintah Kecamatan Loea selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Dengan ketersediaan sumber daya alam yang nantinya dapat memicu laju perkembangan ekonomi masyarakat tergantung dari penguasaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang ada di Kecamatan Loea menguasai dan bahkan masyarakat memanfaatkan atau mengelola Sumber Daya Alam yang tersedia.

KESIMPULAN

Pemekaran wilayah menambah kesempatan bagi masyarakat di Kecamatan Loea untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan sarana dan prasarana telah banyak dilakukan, mengoptimalkan kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan sembilan tahun dan kesehatan masyarakat. Kecamatan Loea juga telah mengalami peningkatan sarana kesehatan, sarana jalan, kesempatan kerja, dan pendapatan.

REFERENSI

- Basuki, A., pembangunan, U. G.-J. ekonomi & studi, & 2009, undefined. (2009). Penentu sektor unggulan dalam pembangunan daerah: studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Journal.Umy.Ac.Id*, 10(1), 34–50. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1280>
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V3I2.42>
- Daswati, Hajar Anna Patunrangi, Syamsidar, & Sukmawati. (2020). Koordinasi Camat Dalam Pengelolaan



- Kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.34>
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomi daerah dan Implementasinya di Indonesia. *Journal.Ui.Ac.Id*. <http://journal.ui.ac.id/science/article/viewFile/220/216>
- Henny Mayrowani. (2012). Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan Dan Implementasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.*, 30(1), 31.
- Magdalena Silawati Samosir. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Prawoto, N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Journal.Umy.Ac.Id*, 9(1), 56–68. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif*, 18(2), 86. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>
- Ristanti, Y., Akuntansi, E. H.-J. R. (Riset, & 2017, U. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal.Untidar.Ac.Id*. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/220>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/4128>
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X, June*, 1–29.
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan Ekonomi Dalam Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.26858/jiap.v5i1.1079>
- Widayanti, A., and, D. D.-J. of E. R., & 2017, undefined. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah. *Journal.Umy.Ac.Id*, 1(2), 101–109. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/9071>
- Widianingsih, I., & Pancasilawan, R. (2018). Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province. *103.76.50.195*. <http://103.76.50.195/iap/article/view/6532>